

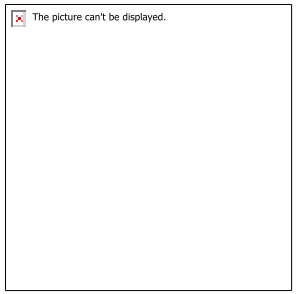
Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Kredit Program Pembiayaan: Kriteria Kredit Industri Padat Karya

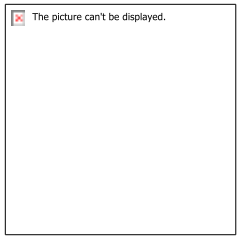
Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
Kementerian Perindustrian

Dasar Hukum Program KIPK

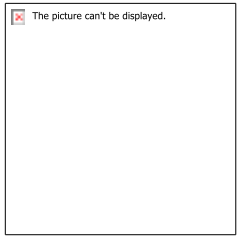
Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



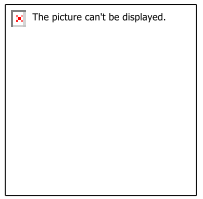
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya jo Permenko Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pemberian Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya

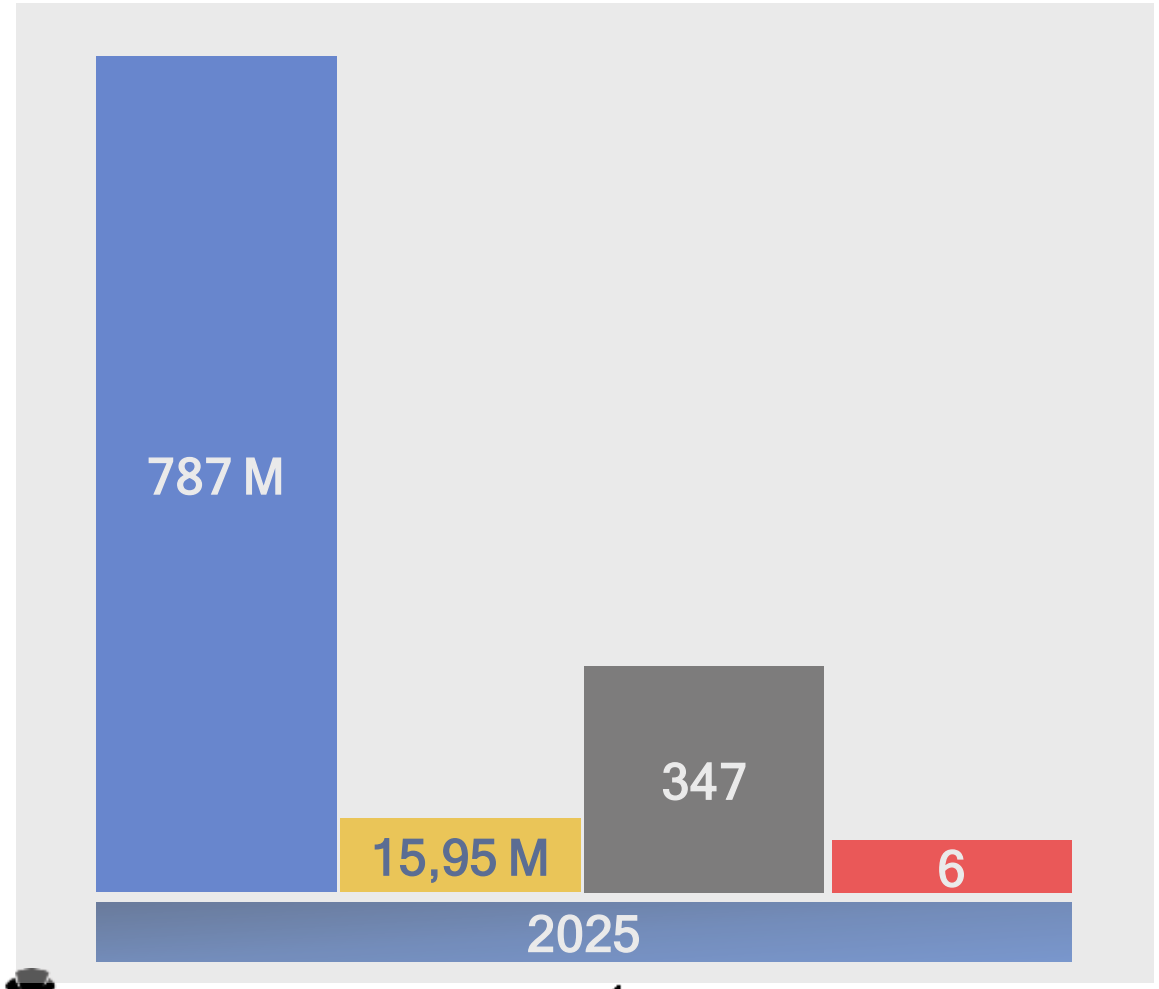


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya

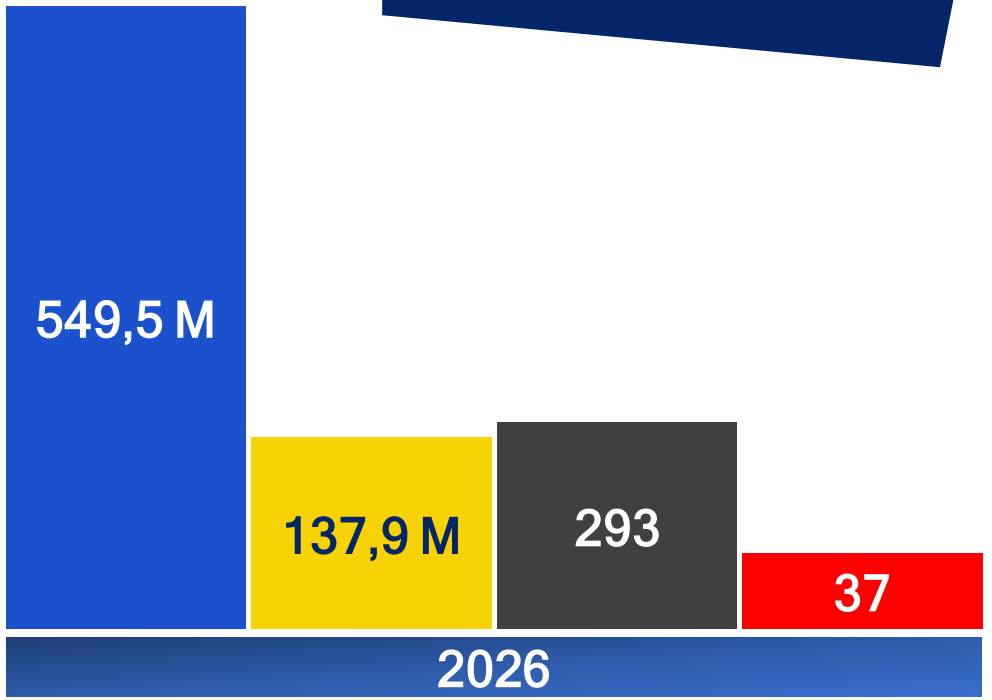


Peraturan Dirjen KPAII Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya

Capaian Program Kredit Industri Padat Karya



Realisasi Penyaluran 2026
25,1%

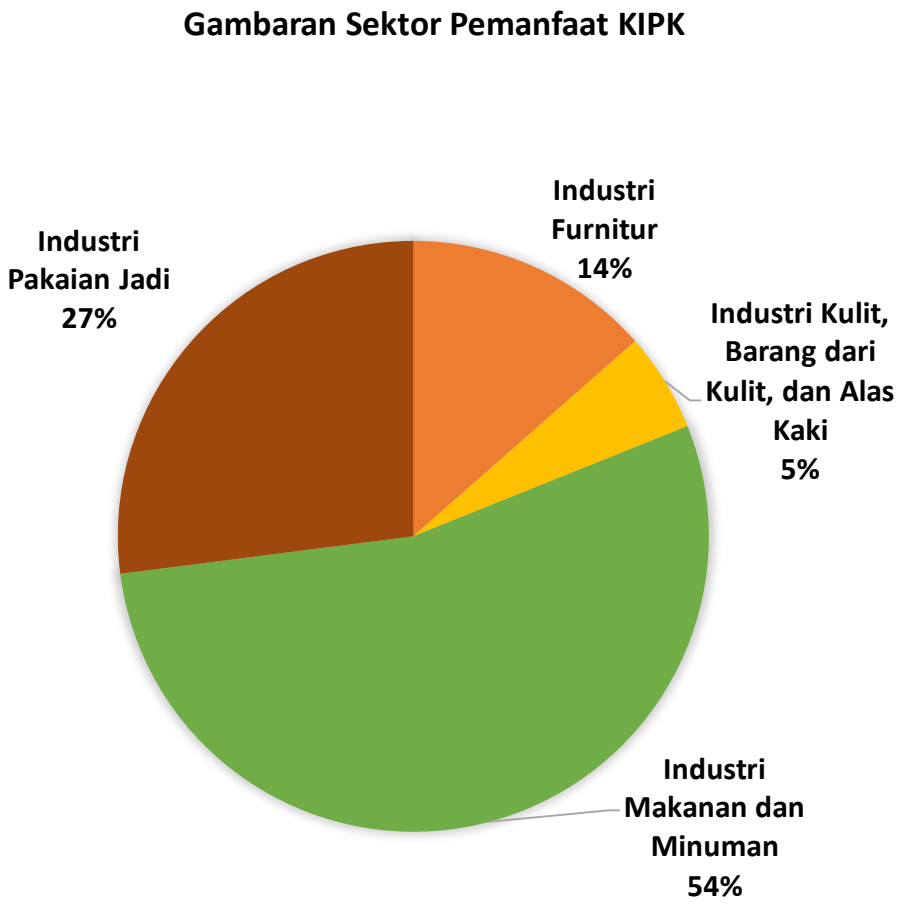


Plafon KIPK | Realisasi Plafon | Target Debitur | Debitur Terfasilitasi

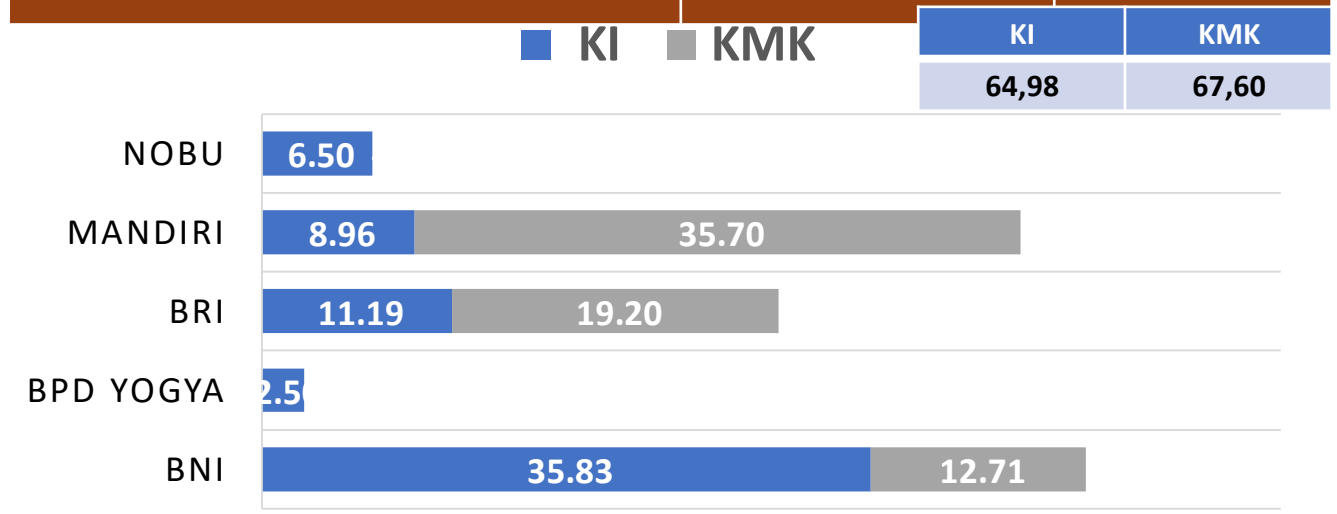
*) Data per 25 Oktober 2026

**) Penyaluran baru TA 2026

Gambaran Sektor Pemanfaat Program KIPK (2026)



Sektor	Penyaluran (Rp M)	Jumlah Debitur
Furnitur	21,15	5
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	13,94	2
Makanan dan Minuman	78,80	20
Pakaian Jadi	4,03	10



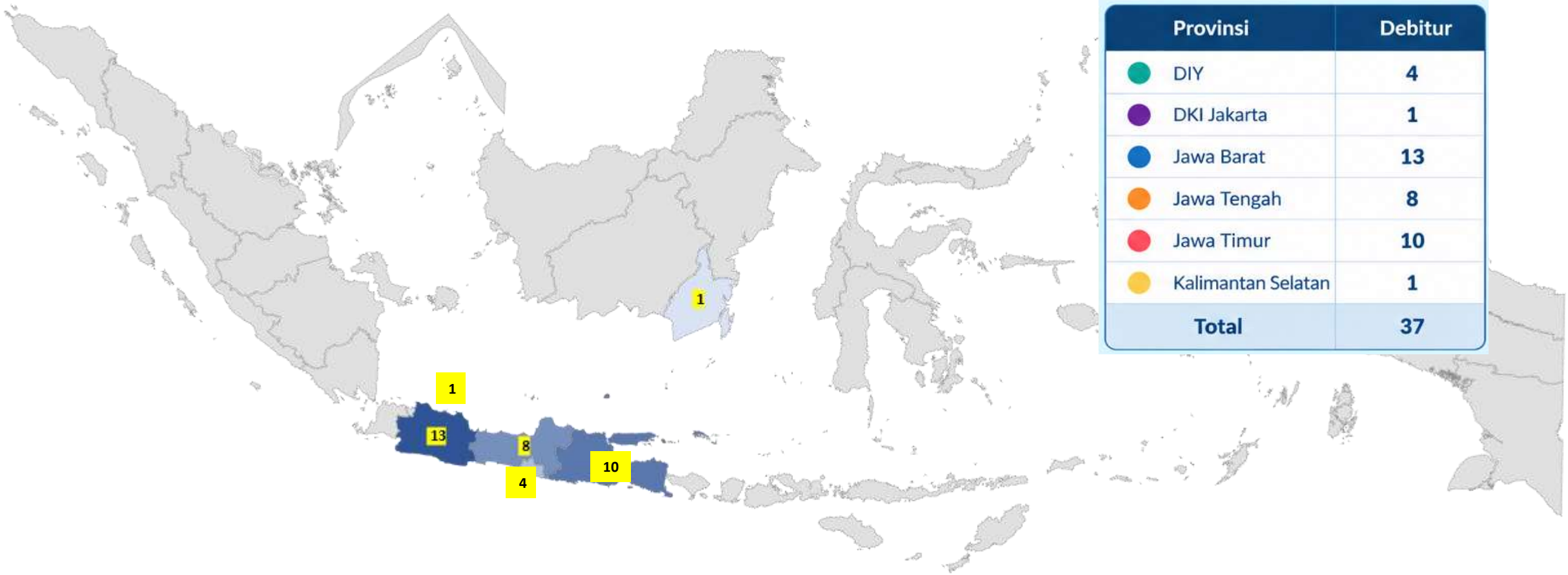
Penyaluran baru periode Jan - 26 Okt 2026

Realisasi 25,1% dari target

*data sementara

Sebaran Wilayah Debitur KIPK

Debitur KIPK masih terfokus di Pulau Jawa



Provinsi	Debitur
DIY	4
DKI Jakarta	1
Jawa Barat	13
Jawa Tengah	8
Jawa Timur	10
Kalimantan Selatan	1
Total	**37**

Fitur dan Skema Kredit Industri Padat Karya

(Permenko 4/2025 jo Permenko 10/2026)

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Fitur Kredit Padat Karya

No.	Komponen	Fitur
1.	Plafon	>Rp500 juta s.d. Rp10 miliar
2.	Suku Bunga	Selisih dari biaya bunga penyalur dikurangi subsidi bunga pemerintah
3.	Subsidi Bunga	**5% p.a.** (akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan)
4.	Tenor	**Paling lama 8 tahun** (dimungkinkan adanya suplesi, perpanjangan, restrukturisasi)
5.	Penjaminan/ Pertanggungan	**Penjaminan/Pertanggungan bersifat:** 1. **Diwajibkan** jika **appraisal collateral <100%** dari kredit yang diajukan 2. **Opsional** jika **appraisal collateral sesuai atau lebih besar** dari kredit yang diajukan Ketentuan tarif IJP/Premi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
6.	Agunan Pokok	Objek yang dibiayai oleh Kredit Industri Padat Karya
7.	Agunan Tambahan	Sesuai penilaian objektif Penyalur Kredit
8.	Risk Acceptance Criteria (RAC)	Diserahkan kepada kebijakan masing – masing Penyalur Kredit.

Persyaratan Penerima Kredit Industri Padat Karya

1. Perseorangan atau Badan Usaha yang bergerak di **industri padat karya tertentu** pada subsektor **Pakaian Jadi; Tekstil; Furnitur; Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Makanan dan Minuman; Mainan Anak**; **Aneka dan Kerajinan; Kimia; Kelistrikan dan Elektronika; Kreatif Digital; dan/atau Transportasi dan Penyimpanan**
2. Memiliki minimal **25 tenaga kerja** untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan terakhir secara berturut-turut sesuai hasil validasi penyalur;
3. Memiliki usaha yang **produktif dan layak**;
4. Memiliki **NPWP dan NIB**;
5. Menjadi **peserta BPJS Ketenagakerjaan**;
6. Menjalankan usaha **minimal 2 (dua) tahun** di **bidang industri padat karya;**
7. **Tidak terdapat informasi negatif** yang dibuktikan dengan hasil *trade, community checking,* dan/atau *bank checking;*
8. Tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah **secara bersamaan**;

Kriteria Kredit Industri Padat Karya (Permenperin 34/2025)



Permenperin tentang KIPK (Pasal 4)

a. Telah memenuhi komitmen perizinan berusaha;
b. Memiliki akun SIINas;
c. Telah memenuhi kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas; dan
d. Telah menjalankan kewajiban perpajakan pada 1 tahun pajak terakhir.



Penyalur KIPK melakukan validasi kriteria



Dalam hal, "**kewajiban penyampaian data industri belum dipenuhi**", calon Penerima KIPK dapat memenuhi kriteria setelah penyaluran namun sebelum pengajuan penagihan subsidi bunga/subsidi margin

Daftar Sektor Usaha Penerima KIPK

No.	Sektor Usaha	Keterangan
1.	Pakaian Jadi	Sektor Industri Penerima KIPK berdasarkan Permenko Ekon Nomor 4/2025
2.	Tekstil	
3.	Furnitur	
4.	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	
5.	Makanan dan Minuman	
6.	Mainan Anak	
7.	Aneka dan Kerajinan	Sektor Usaha Tambahan Penerima KIPK berdasarkan Permenko Ekon Nomor 10/2026 (Usulan KBLI Sektor Usaha Transportasi dan Penyimpanan masih menunggu konfirmasi dari Kemenhub)
8.	Kimia	
9.	Kelistrikan dan Elektronika	
10.	Kreatif Digital	
11.	Transportasi dan Penyimpanan	

Penggunaan Kredit Industri Padat Karya

(Permenko 4/2025 jo Permenko 10/2026)

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi Baru



Modal Kerja



Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi Baru dan Modal Kerja



Pembiayaan Ulang Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 tahun

Uang Muka Pembelian Mesin minimal:

1. **10%** skala mikro dan kecil
2. **25%** skala menengah

dari Dana Calon Penerima KIPK

Diutamakan Mesin dan Peralatan **Buatan Dalam Negeri**



Terima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL
KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN
AKSES INDUSTRI INTERNAISONAL

**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**